

Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

Restia Nurza^{1*}

¹ Universitas Andalas

* restianurza07@gmail.com

Abstract. Paper ini membahas evaluasi dampak model Collaborative Governance pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Collaborative Governance merupakan pendekatan yang semakin diperhatikan dalam upaya mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari penerapan model Collaborative Governance dalam konteks pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Metode penelitian melibatkan studi kasus dari beberapa proyek pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang menerapkan Collaborative Governance. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait dan analisis dokumen terkait pelaksanaan model ini. Selain itu, indikator-indikator kinerja seperti partisipasi masyarakat, kualitas keputusan bersama, dan hasil-hasil pengelolaan sumber daya juga dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Collaborative Governance dapat membawa dampak positif pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengurangan konflik antara pemangku kepentingan, dan peningkatan kualitas keputusan bersama adalah beberapa hasil yang signifikan. Selain itu, model ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Sumber Daya Berkelanjutan, Dampak

1. Pendahuluan

Collaborative governance merupakan paradigma baru dalam tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan [1][2]. Model ini telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu bidang di mana tata kelola kolaboratif telah dievaluasi adalah pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Collaborative governance adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menangani masalah-masalah yang kompleks. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi, partisipasi, dan komunikasi terbuka antara berbagai pihak yang terlibat.

Karakteristik utama dari *collaborative governance* mencakup partisipasi aktif, di mana berbagai pihak yang terlibat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dengan pandangan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Selain itu, terdapat keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pertukaran informasi terkait pelaksanaan kebijakan, yang menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Collaborative governance juga melibatkan kolaborasi antar organisasi, baik dari sektor publik maupun swasta, serta masyarakat sipil. Hal ini memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan kapasitas dari berbagai sektor untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tujuannya adalah mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan dengan menciptakan kesepakatan yang dapat dijalankan dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks.

Pendekatan *collaborative governance* juga digunakan untuk menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, seperti perubahan iklim, ketidakesetaraan, atau kebijakan lingkungan. Ini menciptakan peluang untuk inovasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, dengan memungkinkan ide-ide baru dan solusi-solusi kreatif muncul.

Collaborative governance dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional atau internasional. Pendekatan ini menjadi alat yang kuat untuk mencapai kesepakatan

yang lebih inklusif, kebijakan yang lebih baik, dan pemecahan masalah yang lebih efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terkoneksi.

Pengelolaan yang akuntabel dan optimal dalam manajemen pembangunan, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini memungkinkan berbagai perspektif masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga hasilnya lebih optimal. Dalam proses ini, semua pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta, harus berkolaborasi.

Collaborative Governance adalah konsep yang relevan dalam konteks ini. Collaborative Governance melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ini menciptakan kolaborasi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dan memungkinkan penyusunan rencana yang lebih baik.

Indonesia memiliki berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, termasuk sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil. Mereka semua dapat berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua *stakeholder* menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Tata kelola kolaboratif merupakan forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mengambil keputusan bersama dan mencapai konsensus melalui interaksi formal dan informal yang saling menguntungkan [2]. Model tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan [4]. Proses kolaborasi melibatkan beberapa komponen, antara lain kolaborasi dinamis, tindakan kolaboratif, dan dampak sementara serta adaptasi dari proses kolaborasi [2][4].

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berhasil diterapkan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan sampah, perikanan, dan pembangunan berkelanjutan [1][5][6]. Tata kelola kolaboratif terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja lembaga dan program dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan sistem akuntabilitas [4][6]. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan tata kelola kolaboratif, seperti membangun kepercayaan dan kepemilikan di antara para pemangku kepentingan dan mengembangkan proses kolaborasi yang efektif [2][4].

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2017) mengenai pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Surabaya juga mengungkapkan bahwa partisipasi *stakeholder* lain dalam kolaborasi masih minim [7]. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya upaya sosialisasi terkait program seperti *Car Free Day*. Selain itu, akses informasi yang terbatas bagi para *stakeholder* dan dominasi pengambilan keputusan oleh pemerintah (pendekatan *Top Down*) juga menjadi masalah yang diidentifikasi.

Collaborative governance, sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah publik melalui kerjasama antar pemangku kepentingan, seharusnya memungkinkan penanganan masalah yang lebih efektif dan efisien. Namun, banyaknya hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Dalam konteks Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kurangnya kolaborasi, khususnya dari masyarakat, dapat menyebabkan program-program yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, padahal masyarakat adalah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dan hasil perencanaan pembangunan. Selain itu, lembaga non-pemerintah yang juga memiliki peran penting dalam perbaikan masyarakat juga seharusnya lebih terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsep *collaborative governance* telah diimplementasikan dalam Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* dalam Musrenbangdes masih belum optimal, dengan kurangnya inklusivitas dalam keterwakilan peserta. Selain itu, aktor swasta dan pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat lokal yang memiliki usaha sendiri masih kurang terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Data ini mencerminkan kondisi yang ditemukan dalam penelitian.

Hasil dari pelaporan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan menunjukkan bahwa jumlah peserta atau daftar hadir peserta masih terbatas, mengindikasikan keterbatasan keterwakilan dan keterlibatan stakeholder dalam proses tersebut. Masalah ini menjadi fokus dalam konteks pelaksanaan Musrenbangdes, terutama dalam kerangka konsep *collaborative governance*. Desa Sungai Rambutan, sebagai desa transmigrasi dengan populasi heterogen yang terdiri dari etnis Jawa dan etnis asli Ogan Ilir, menambah kompleksitas tantangan ini.

Dalam konteks ilmu pemerintahan, pelaksanaan Musrenbangdes yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan sebagai *stakeholder* merupakan hal penting. *Stakeholder* dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peran yang krusial dalam mencapai perencanaan pembangunan yang kolaboratif.

Konsep *collaborative governance* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang diusulkan oleh Ratner, yang terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam tata kelola, yang melibatkan pendengaran aktif dan pemahaman masalah dari berbagai pemangku kepentingan. Tahap kedua adalah debat strategi untuk mempengaruhi, di mana pemangku kepentingan berdialog dan berdiskusi tentang solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi. Tahap ketiga adalah perencanaan tindakan kolaboratif, di mana pemangku kepentingan mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibahas sebelumnya dan memastikan kelangsungan kolaborasi dalam jangka panjang.

Dalam artikel ini, akan dilakukan evaluasi dampak model tata kelola kolaboratif terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Peneliti akan menganalisis kekuatan dan kelemahan model ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian dan pengambilan kebijakan di masa depan.

2. Metode Penelitian

Peneliti akan mengevaluasi dampak model tata kelola kolaboratif terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti akan melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengevaluasi dampak tata kelola kolaboratif terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Peneliti akan menganalisis kekuatan dan kelemahan model tata kelola kolaboratif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Peneliti juga akan melakukan studi kasus terhadap program yang telah menerapkan model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini, termasuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan sektor swasta. Peneliti juga akan mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti laporan dan dokumen terkait program. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Metode ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengidentifikasi tema dan pola dalam data dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan desa. Desa Sungai Rambutan, yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, memiliki populasi sebanyak 755 kepala keluarga. Desa ini memiliki karakteristik sebagai desa transmigrasi dengan penduduk yang terdiri dari etnis Jawa dan penduduk asli Ogan Ilir. Terdiri dari 5 dusun dan 14 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 2.887 orang.

Pembangunan desa memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga desa secara bersamaan. Ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Musrenbangdes, pendekatan ini berarti bahwa partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa yang lebih luas, yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga desa secara bersamaan, adalah pendekatan yang sesuai dengan

visi pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan tidak hanya sebatas pencapaian target fisik atau peningkatan infrastruktur, tetapi juga berfokus pada peran penting masyarakat dalam proses tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kemampuan kepada penduduk desa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akses terhadap sumber daya, sehingga mereka dapat aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat adalah pemangku kepentingan yang penting dalam proses pembangunan, dan mereka memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang berharga yang dapat mendukung keberhasilan proyek pembangunan.

Pengembangan lembaga desa juga merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Lembaga desa yang kuat dan efektif dapat memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak, mengelola sumber daya secara bijaksana, dan mendukung implementasi program pembangunan. Dengan memiliki lembaga desa yang baik, pemerintah desa dapat lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengemukakan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas mereka. Dengan demikian, rencana pembangunan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan implementasinya akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat.

Pendekatan ini juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan karena melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Ini mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan, menghindari pemborosan sumber daya, dan memastikan dampak positif jangka panjang.

Dengan demikian, pembangunan desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga desa adalah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mencapai lebih dari sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.

Dalam tahap Identifikasi Hambatan dan Peluang, yang diilustrasikan oleh konsep yang diusulkan oleh Ratner (2012), penting untuk memperluas ruang diskusi, meningkatkan aspirasi, dan memperbanyak keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok. Pemerintah desa bertanggung jawab membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan gagasan [8]. Hal ini penting untuk mengumpulkan berbagai perspektif yang dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang. Output dari tahap ini adalah pemahaman bersama tentang prioritas usulan yang akan menjadi pertimbangan dalam musyawarah selanjutnya.

Tahap Identifikasi Hambatan dan Peluang dalam konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebenarnya dari masyarakat. Konsep yang diusulkan oleh Ratner (2012) menekankan beberapa aspek penting dalam tahap ini yaitu:

- **Mempertimbangkan Berbagai Perspektif**

Tahap ini mengharuskan perluasan ruang diskusi dengan memperbanyak keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. Ini mencakup pemangku kepentingan yang mungkin memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan menggali berbagai perspektif ini, tahap Identifikasi Hambatan dan Peluang menjadi lebih inklusif dan memungkinkan adanya berbagai sudut pandang yang dapat menjadi kontribusi berharga dalam merumuskan rencana pembangunan.

- **Meningkatkan Aspirasi**

Salah satu tujuan utama dalam tahap ini adalah meningkatkan aspirasi masyarakat. Ini berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk bermimpi lebih besar tentang pembangunan desa mereka. Dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka harapkan dari pembangunan desa, aspirasi ini dapat menjadi dorongan bagi perubahan yang positif dan ambisius.

- **Mengumpulkan Masukan dan Gagasan**

Pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan gagasan. Ini bisa berarti mengadakan pertemuan, diskusi

kelompok, survei, atau berbagai cara lain untuk mengumpulkan pandangan dan ide masyarakat. Semakin banyak masukan yang dikumpulkan, semakin komprehensif pemahaman tentang kebutuhan dan potensi desa.

- **Pemahaman Bersama tentang Prioritas**

Output utama dari tahap ini adalah pemahaman bersama tentang prioritas usulan. Ini mencakup kesepakatan tentang apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan desa. Dengan adanya pemahaman bersama ini, Musrenbangdes selanjutnya dapat berfokus pada pemilihan proyek-proyek yang paling relevan dan mendesak untuk dilaksanakan.

Dengan menjalankan tahap Identifikasi Hambatan dan Peluang dengan baik, Musrenbangdes dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih akurat dan berdasarkan pada kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Ini juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap rencana tersebut, karena mereka merasa bahwa aspirasi dan masukan mereka telah diperhitungkan dengan serius. Sebagai hasilnya, pembangunan desa dapat lebih berhasil dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014, perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ini melibatkan Musyawarah Dusun (Musdus) di tingkat RT, RW, atau dusun, di mana aspirasi dan usulan masyarakat mengenai program kerja untuk tahun yang bersangkutan dikumpulkan.

Analisis situasi tindakan, terkait dengan penyediaan informasi dan pengaruh aturan yang ditetapkan pada tingkat konstitusional dan kolektif, mencerminkan kondisi kontekstual yang memengaruhi proses kolaborasi. Misalnya, aktor pemerintah mungkin memiliki kepentingan yang berlawanan dengan konsolidasi data lahan yang terfragmentasi, karena hal ini bisa merugikan kepentingan ekonomi swasta dan manfaat politik yang mereka asosiasikan dengan struktur tata kelola informasi yang ada (Gotgelf, 2022)[10].

Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun kapasitas untuk mengumpulkan dan melaporkan data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Penilaian dan pelaporan data yang ada dapat menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan.

Identifikasi Hambatan dan Peluang

Identifikasi hambatan dan peluang adalah langkah kritis dalam proses perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. Dalam upaya ini, penting untuk memperluas ruang diskusi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Proses identifikasi ini memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengumpulkan informasi faktual dari berbagai sudut pandang, sehingga hambatan dan peluang yang muncul dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh desa dan potensi solusi yang dapat diambil. Dengan demikian, identifikasi hambatan dan peluang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Tahap ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperluas dan diperjelas:

- **Menggali Berbagai Sudut Pandang**

Salah satu aspek penting adalah memperluas ruang diskusi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Ini termasuk masyarakat desa dari berbagai kelompok usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Juga, melibatkan pihak swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang memiliki wawasan yang berbeda-beda. Semakin beragam perspektif yang dihadirkan, semakin lengkap pemahaman tentang masalah dan potensi solusi yang dapat diidentifikasi.

- **Informasi Faktual dari Berbagai Sudut Pandang**

Proses identifikasi ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan informasi faktual dari berbagai sudut pandang. Ini berarti mencari data, fakta, dan pengalaman riil dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini membantu dalam mendefinisikan masalah dengan lebih akurat dan menyediakan dasar yang kuat untuk merumuskan rencana pembangunan yang efektif.

- **Menyelidiki Hambatan dan Peluang**

Selama proses ini, hambatan dan peluang yang mungkin muncul dalam pembangunan desa dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Hambatan ini bisa berupa masalah infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, atau aspek lain yang menghambat kemajuan desa. Sementara itu, peluang dapat mencakup potensi sumber daya alam, keahlian khusus dalam masyarakat, atau perkembangan positif yang dapat dimanfaatkan.

- Dasar untuk Kebijakan dan Program Pembangunan

Hasil dari identifikasi hambatan dan peluang menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif. Kebijakan yang dihasilkan akan lebih berdasarkan pada kebutuhan sebenarnya dari masyarakat desa, dan program-program tersebut akan lebih relevan dan berkelanjutan.

- Meningkatkan Partisipasi dan Kepemilikan

Melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi ini juga meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan mereka terhadap rencana pembangunan. Masyarakat merasa bahwa aspirasi dan masukan mereka dihargai dan diperhitungkan, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mendukung dan berkontribusi pada pembangunan desa.

Dengan menjalankan tahap identifikasi hambatan dan peluang ini dengan baik, Musrenbangdes dapat mencapai tujuan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan efektif. Ini membantu memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, unsur masyarakat didorong untuk mengumpulkan aspirasi di tingkat dusun. Ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa dan Tokoh Masyarakat, yang menekankan bahwa semua anggota masyarakat diminta untuk menganalisis masalah yang ada di wilayah mereka, baik dari perspektif yang berbeda. Untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah desa, masyarakat dapat melakukannya melalui RT dan Kepala Dusun. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini terjadi secara informal. Hal ini juga dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat yang mengungkapkan bahwa usulan-usulan diajukan dalam rapat kecil selama Musrenbangdes, yang dihadiri oleh RT, Kepala Dusun, dan beberapa perwakilan masyarakat. Biasanya, hanya sekitar 4-5 orang yang diundang untuk mewakili masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Dengan kata lain, tidak ada forum khusus yang disediakan untuk mengumpulkan aspirasi, gagasan, dan usulan dari masyarakat, baik di tingkat RT maupun di tingkat dusun.

Pengumpulan aspirasi diserahkan kepada pimpinan wilayah, yaitu Kadus dan RT, dan pelaksanaannya tidak terbuka dan terencana dengan baik, seperti melalui forum dialog dalam Musyawarah Dusun atau forum serupa. Minimnya forum tersebut juga disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam aktivitas pembangunan di Desa Sungai Rambutan. Kepala Dusun 4 bahkan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum mempertimbangkan perkembangan desa secara keseluruhan, lebih fokus pada kebutuhan individu mereka. Meskipun demikian, menurut Sekretaris Desa Kimin, setiap dusun biasanya sudah memiliki catatan usulan mereka sendiri sebelum Musrenbangdes, dan usulan tersebut akan disampaikan saat Musrenbangdes.

Dalam prinsipnya, tata kelola kolaboratif melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa minimnya forum untuk menghimpun aspirasi dan usulan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Musrenbangdes, yang seharusnya dimulai dengan forum dialog di tingkat dusun yang disebut sebagai Musyawarah Dusun. Ini berdampak pada representasi yang kurang akurat dari usulan dan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang subjektif dan sepihak. Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis *collaborative governance*, ini tidak sesuai dengan pendekatan yang diinginkan, yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan "*bottom-up*."

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat terkait Musrenbangdes. Pendampingan dari pendamping lokal desa dapat membantu memandu masyarakat dalam proses Musrenbangdes dan menjelaskan pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Meskipun tantangan ini mungkin besar, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pendamping lokal desa, serta kemungkinan partisipasi aktor lain seperti akademisi dan pihak swasta, dapat membantu mempercepat pembangunan dan mengatasi keterbatasan anggaran yang sering kali

mengakibatkan banyak usulan pada Musrenbangdes yang tidak dapat diakomodir. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes adalah langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan berbasis musyawarah yang diinginkan.

Berikut penjelasan terperinci untuk mengatasi masalah ini:

1. Pengenalan dan Pendidikan kepada Masyarakat

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya Musrenbangdes dan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam proses ini merupakan hal yang krusial. Upaya sosialisasi yang efektif dapat membantu warga memahami peran mereka dalam perencanaan pembangunan desa dan dampak positif yang bisa mereka berikan.

2. Bimbingan oleh Pendamping Lokal Desa

Mendapatkan dukungan dari pendamping lokal desa atau fasilitator bisa menjadi solusi yang bermanfaat. Mereka dapat membantu mengkoordinasikan dialog di tingkat dusun (Musyawarah Dusun) dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam merumuskan usulan yang sesuai. Selain itu, mereka juga bisa berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi atau *platform online*, bisa mempermudah proses pengumpulan usulan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat membantu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat dalam mengadakan pertemuan fisik.

4. Kolaborasi dengan Pihak-pihak Lain

Melibatkan aktor-aktor lain seperti akademisi, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah dapat memberikan perspektif dan sumber daya tambahan dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Mereka dapat memberikan wawasan yang beragam dan mendukung upaya pembangunan desa secara menyeluruh.

5. Meningkatkan Keterbukaan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa harus berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Ini mencakup memberikan umpan balik kepada masyarakat mengenai hasil Musrenbangdes serta langkah-langkah yang telah diambil.

6. Evaluasi dan Perbaikan Proses

Secara berkala, proses Musrenbangdes bisa dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memperbaikinya. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pendamping lokal desa, dan aktor lainnya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat ditingkatkan, sehingga lebih sesuai dengan pendekatan *collaborative governance* yang diinginkan dan lebih efektif dalam merumuskan rencana pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Strategi debat untuk mempengaruhi merupakan pendekatan yang penting dalam upaya memengaruhi hasil keputusan kolaboratif, terutama dalam konteks musyawarah atau perencanaan pembangunan seperti musrenbangdes. Pertama, identifikasikan isu-isu kunci yang relevan dengan tujuan kolaborasi dan pastikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu tersebut. Selanjutnya, kembangkan argumen yang kuat yang mendukung posisi atau usulan, dan persiapkan bukti atau data yang relevan untuk mendukung argumen tersebut. Saat berdebat, fokus pada komunikasi yang efektif, berbicaralah dengan sopan, dan dengarkan dengan cermat argumen dari pihak lain. Gunakan logika dan bukti yang kuat untuk meyakinkan pemangku kepentingan lainnya tentang keunggulan usulan atau posisi. Selain itu, identifikasikan kesamaan atau titik temu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kolaborasi yang tidak memadai dalam proses kebijakan antara pemerintah dan aktor kepentingan lainnya merupakan salah satu hambatan utama yang menghambat koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif. Selain itu, prosedur yang kompleks untuk pertukaran informasi antara kelompok kepentingan juga menjadi faktor yang sulit. Kondisi ini berpotensi menghambat diskusi antar kelompok kepentingan dalam menentukan strategi pelaksanaan kebijakan.

Kolaborasi yang kurang efektif antara berbagai pihak dengan kepentingan tertentu dapat menjadi kendala serius dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

1. Hambatan dalam Koordinasi

Ketika kolaborasi tidak berjalan dengan baik, koordinasi antara pemerintah dan aktor kepentingan lainnya menjadi sulit. Ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab, serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Pertukaran Informasi yang Tidak Efektif

Pertukaran informasi yang efektif sangat penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas. Kolaborasi yang tidak memadai dapat menghambat aliran informasi yang tepat waktu dan akurat antara pemerintah dan kelompok kepentingan. Akibatnya, kebijakan dapat kurang informasi, tidak relevan, atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Prosedur yang Kompleks

Adanya prosedur yang kompleks untuk pertukaran informasi antara berbagai kelompok kepentingan juga dapat menjadi hambatan. Ketika proses ini terlalu rumit atau memakan waktu, hal ini dapat mengurangi minat dan motivasi pihak-pihak yang terlibat untuk berkolaborasi secara efektif.

4. Kendala dalam Diskusi: Kolaborasi yang buruk juga dapat menghambat diskusi antara kelompok kepentingan. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan efektif dapat membuat sulit untuk mencapai kesepakatan bersama atau untuk merumuskan strategi pelaksanaan kebijakan yang komprehensif.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk mempromosikan kolaborasi yang lebih efektif dan transparan antara pemerintah dan aktor kepentingan. Ini dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, pembentukan forum dialog yang terbuka, dan pemberian insentif bagi semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Ratner (dalam Astuti et al., 2020), tahap strategi debat untuk mempengaruhi hasil Musrenbangdes adalah tahap yang fokus pada dinamika kepentingan dalam setiap usulan dan aspirasi yang pada akhirnya menjadi usulan prioritas dalam Musrenbangdes [9]. Usulan prioritas yang biasanya mendominasi saat pelaksanaan Musrenbangdes cenderung berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti jalan dan jembatan. Pembangunan fisik selalu menjadi prioritas utama karena berkaitan dengan kepentingan umum dan memfasilitasi akses masyarakat ke tempat-tempat seperti lahan pertanian, kebun karet, kebun sawit, dan lainnya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penentuan prioritas dalam usulan-usulan ini didasarkan pada kebutuhan bersama dan kepentingan publik, sehingga usulan yang biasanya diajukan dalam Musrenbangdes tidak mengalami perubahan signifikan sebelum usulan-usulan sebelumnya terealisasi. Sejauh ini, mayoritas usulan yang diajukan dalam Musrenbangdes dianggap sudah mewakili kepentingan umum. Hal ini ditegaskan oleh ketua BPD, tokoh masyarakat, dan sekretaris desa, yang menyatakan bahwa semua usulan yang dibawa ke Musrenbangdes telah mencerminkan aspirasi masyarakat dari setiap dusun, dan kesepakatan dalam pemilihan usulan prioritas melibatkan semua pemangku kepentingan yang diatur dalam aturan Musrenbangdes.

Meskipun demikian, kepala dusun ke-4 menunjukkan bahwa perlu diperhatikan masalah keterwakilan masyarakat, karena tingkat partisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan masih rendah, sekitar 25% dari total kepala keluarga.

Tingkat partisipasi yang masih rendah, yaitu sekitar 25% dari total kepala keluarga, mengindikasikan beberapa masalah yang perlu diatasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Keterwakilan yang Tidak Merata

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bisa mengakibatkan keterwakilan yang tidak merata. Ini berarti bahwa suara dan aspirasi sebagian besar masyarakat mungkin tidak terwakili dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di kalangan penduduk.

- Kurangnya Diversitas Perspektif

Dengan partisipasi yang rendah, variasi dalam perspektif dan kebutuhan masyarakat mungkin tidak tercermin secara memadai dalam usulan dan kebijakan yang dihasilkan. Ini bisa mengarah pada program pembangunan yang tidak cukup relevan atau efektif dalam memenuhi kebutuhan seluruh komunitas.

- **Minimnya Legitimasi dan Dukungan**

Rendahnya partisipasi dapat mengurangi tingkat legitimasi dan dukungan terhadap hasil Musrenbangdes. Masyarakat yang merasa tidak terlibat dalam proses ini mungkin kurang bersedia untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang dihasilkan.

Untuk mengatasi masalah keterwakilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:

- **Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat**

Penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif tentang Musrenbangdes dan mengedukasi masyarakat tentang peran dan manfaatnya. Informasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi semua lapisan masyarakat.

- **Mengidentifikasi Hambatan Partisipasi**

Melakukan penelitian atau konsultasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat partisipasi. Ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

- **Menggunakan Teknologi Informasi**

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi atau platform online, dapat memudahkan pengumpulan usulan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat membantu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat dalam mengadakan pertemuan fisik.

- **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Pemerintah desa harus berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Ini termasuk memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang hasil Musrenbangdes dan langkah-langkah yang telah diambil.

- **Menggali Alasan Rendahnya Partisipasi**

Penting juga untuk memahami mengapa partisipasi rendah. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman, hambatan ekonomi, atau alasan lain? Menyelidiki akar penyebabnya dapat membantu merancang solusi yang lebih efektif.

Dengan upaya yang tepat dan komitmen untuk meningkatkan partisipasi, Musrenbangdes dapat menjadi lebih inklusif dan efektif dalam merencanakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat.

Pertimbangan terkait sejumlah usulan pembangunan fisik yang memerlukan anggaran besar seharusnya diargumentasikan dengan baik selama diskusi dalam Musrenbangdes, agar tidak menghambat pembangunan karena keterbatasan anggaran, terutama ketika jumlah usulan pembangunan fisik melebihi anggaran yang tersedia. Pembagian peran dalam konsep kolaborasi pembangunan merupakan tindakan taktis yang bisa dilakukan untuk memastikan sejumlah program bisa berjalan dengan optimal. Ini juga melibatkan aktor-aktor yang dapat membantu mengatasi masalah yang muncul, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, dan melibatkan mereka secara aktif dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, usulan pembangunan fisik tidak hanya bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta Penerimaan Bagi Hasil (PBH). Konsep *collaborative governance* menciptakan rasa "kepemilikan bersama" terhadap masalah dan mencari pemecahan dari berbagai perspektif yang berbeda. Ini juga berfungsi sebagai mediator agar semua aktor dapat mencapai pemahaman yang sama tentang suatu masalah.

Pentingnya mengargumentasikan dengan baik pertimbangan terkait sejumlah usulan pembangunan fisik yang memerlukan anggaran besar selama diskusi dalam Musrenbangdes tidak dapat dilebih-lebihkan. Hal ini menjadi kunci untuk menghindari hambatan dalam pembangunan yang dapat terjadi akibat keterbatasan anggaran, terutama ketika jumlah usulan pembangunan fisik melebihi anggaran yang tersedia.

Dalam konteks ini, strategi pembagian peran dalam konsep kolaborasi pembangunan menjadi tindakan yang sangat penting untuk memastikan bahwa sejumlah program dapat berjalan dengan optimal. Hal ini tidak hanya mencakup pengumpulan sumber daya finansial dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), atau Penerimaan Bagi Hasil (PBH), tetapi juga melibatkan aktor-aktor yang dapat memberikan kontribusi lain yang sangat berharga.

Salah satu hal yang sangat penting adalah melibatkan aktor-aktor yang memiliki pengetahuan atau sumber daya teknis yang dapat membantu mengatasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan program pembangunan. Ini bisa berarti melibatkan ahli teknis, pakar lingkungan, atau pihak swasta yang memiliki keahlian khusus dalam berbagai aspek pembangunan fisik.

Selain itu, konsep *collaborative governance* mendorong terciptanya rasa "kepemilikan bersama" terhadap masalah tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat merasa memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan mereka.

Selain dari aspek finansial, kolaborasi yang efektif juga berperan sebagai mediator dalam mengarahkan semua pihak menuju pemahaman yang seragam tentang suatu masalah. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin muncul selama proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, kolaborasi pembangunan yang sukses bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya secara cerdas, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Merencanakan tindakan kolaborasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan kerjasama antara berbagai pihak atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pertama, identifikasikan dengan jelas tujuan bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi tersebut dan pastikan semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan tujuan ini. Kemudian, kenali dan identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk organisasi dan individu yang memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama. Setelah itu, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam kolaborasi tersebut. Bersama-sama, buat rencana kerja yang mencakup langkah-langkah konkret, alokasi sumber daya, dan hasil yang diharapkan. Buat juga protokol atau perjanjian kerjasama resmi yang mendefinisikan komitmen dan kewajiban setiap pihak. Selanjutnya, atur cara komunikasi, koordinasi, serta mekanisme penyelesaian konflik. Tetapkan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dan lakukan evaluasi berkala. Sediakan juga mekanisme untuk menangani konflik yang mungkin timbul. Selama pelaksanaan, pantau kemajuan dan reaksi dari pemangku kepentingan, dan jika perlu, lakukan penyesuaian dalam rencana kerja. Akhirnya, bagikan hasil dan pencapaian kolaborasi kepada semua pemangku kepentingan dan pihak terkait untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam merencanakan tindakan kolaborasi:

1. Tentukan Tujuan Bersama dengan Jelas

Identifikasi dengan jelas tujuan bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi tersebut. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami dan setuju dengan tujuan ini. Tujuan yang jelas akan menjadi panduan selama seluruh proses kolaborasi.

2. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Kenali dan identifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi, termasuk organisasi dan individu yang memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama. Ini mencakup pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil kolaborasi.

3. Tentukan Peran dan Tanggung Jawab

Setelah pemangku kepentingan diidentifikasi, tentukan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam kolaborasi tersebut. Jelaskan kontribusi yang diharapkan dari setiap pihak untuk mencapai tujuan bersama.

4. Buat Rencana Kerja yang Terinci

Bersama-sama, buat rencana kerja yang mencakup langkah-langkah konkret, alokasi sumber daya (termasuk anggaran dan tenaga kerja), serta hasil yang diharapkan dari kolaborasi. Rencana ini harus menjadi panduan operasional selama pelaksanaan.

5. Sahkan Protokol Kerjasama

Buat protokol atau perjanjian kerjasama resmi yang mendefinisikan komitmen dan kewajiban setiap pihak dalam kolaborasi. Dokumen ini harus mencakup hal-hal seperti tujuan, peran dan tanggung jawab, sumber daya yang akan disediakan, serta mekanisme pelaporan kemajuan.

6. Atur Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Tentukan cara komunikasi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Pastikan ada mekanisme yang memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien dan pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi.

7. Siapkan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Sebelum pelaksanaan dimulai, tentukan mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin muncul selama kolaborasi. Ini dapat berupa prosedur penyelesaian sengketa atau langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus perselisihan.

8. Tentukan Indikator Kinerja

Tetapkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan kolaborasi. Ini membantu dalam memantau sejauh mana tujuan bersama tercapai dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

9. Lakukan Evaluasi Teratur

Lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan kolaborasi. Pantau kemajuan dan tanggapan dari pemangku kepentingan, dan jika perlu, lakukan penyesuaian dalam rencana kerja. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa kolaborasi tetap relevan dan efektif.

10. Bagikan Hasil dan Pencapaian

Akhirnya, bagikan hasil dan pencapaian kolaborasi kepada semua pemangku kepentingan dan pihak terkait. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat dukungan untuk kolaborasi di masa depan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tindakan kolaborasi dapat dijalankan dengan lebih terstruktur, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Langkah-langkah ini juga membantu menjaga kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Tata kelola kolaboratif adalah suatu konsep yang mencakup berbagai struktur dan proses yang memungkinkan berbagai organisasi atau aktor independen untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah publik. Berikut ini pendapat ahli dan pandangan lainnya tentang tata kelola kolaboratif:

1. Menurut Ansell dan Gash (2008), mereka menggambarkan tata kelola kolaboratif sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan, sumber daya, dan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama [10]. Ini melibatkan proses yang berorientasi pada dialog dan interaksi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015), mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam tata kelola kolaboratif [11]. Mereka berpendapat bahwa kolaborasi yang sukses memerlukan keterlibatan aktif, pengakuan terhadap berbagai perspektif, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan bersama .
3. Menurut Bryson et al. (2006), mereka memandang tata kelola kolaboratif sebagai proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil [12]. Mereka menekankan pentingnya perencanaan strategis, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi terus-menerus dalam kolaborasi.
4. Menurut Klijn et al. (2010), mereka menggambarkan tata kelola kolaboratif sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi atau aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama [13]. Jaringan ini dapat bersifat formal atau informal dan melibatkan interaksi yang kompleks antara anggota jaringan.
5. Menurut Agranoff dan McGuire (2003), mereka menyoroti pentingnya koordinasi dan integrasi dalam tata kelola kolaboratif [14]. Mereka berpendapat bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan dan sumber daya dari berbagai organisasi yang terlibat.

Jadi, tata kelola kolaboratif adalah konsep yang mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi aktif, integrasi sumber daya, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang bersama-sama. Ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks.

Pola komunikasi dan pengaturan menjadi kunci penting dalam tata kelola kolaboratif, dan pemerintah perlu mengawasi dan mengatur dinamika perubahan yang berkembang sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan harmonis,

menguntungkan baik bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan (Mulyaningsih, 2021) [15]. Kolaborasi dalam tahap ini melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan usulan prioritas ke dalam perencanaan. Strategi atau inovasi dapat muncul dalam bentuk perencanaan kolaboratif untuk mengukur kemajuan program dan bagaimana kolaborasi dapat menambah nilai dalam sumber daya dan dampak yang lebih luas.

Penggunaan sumber daya harus dioptimalkan dengan mempertimbangkan potensi, kesesuaian, keberlanjutan, dan manfaat yang konsisten guna mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan pembangunan desa (Zitri et al., 2020) [1]. Hasil dari Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan menunjukkan bahwa usulan prioritas sudah mempertimbangkan berbagai jenis usulan dan sudut pandang. Pemerintah desa juga memberikan pertimbangan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Ini menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, dan kebijakan yang dihasilkan dipengaruhi oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangdes. Perspektif ini didukung oleh penjelasan dari tokoh masyarakat dan kepala dusun yang menegaskan bahwa hasil Musrenbangdes ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan yang prioritas dan direncanakan untuk penggunaan anggaran kegiatan.

Pengelolaan sumber daya yang optimal adalah salah satu pilar penting dalam mencapai keberlanjutan dalam pembangunan desa. Hal ini melibatkan berbagai pertimbangan yang harus diperhitungkan, termasuk potensi sumber daya yang tersedia, kesesuaian dengan kebutuhan desa, keberlanjutan jangka panjang, dan manfaat yang konsisten bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hasil dari Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan menunjukkan bahwa ada upaya serius untuk mempertimbangkan berbagai jenis usulan dan sudut pandang selama proses perencanaan.

Pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan hasil Musrenbangdes. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk urgensi, dampak, dan ketersediaan anggaran. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebijakan pemerintah desa semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangdes.

Selain itu, perspektif ini diperkuat oleh penjelasan dari tokoh masyarakat dan kepala dusun yang secara aktif terlibat dalam proses Musrenbangdes. Mereka menegaskan bahwa hasil dari Musrenbangdes benar-benar dijadikan dasar untuk menentukan kebutuhan prioritas dan alokasi anggaran kegiatan. Artinya, kebijakan pembangunan yang dihasilkan berdasarkan hasil Musrenbangdes menjadi respons langsung terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan keadaan desa.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menggambarkan komitmen dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, sehingga dapat mencapai keberlanjutan dalam pembangunan desa. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan penerapan keputusan yang berbasis pada Musrenbangdes adalah langkah yang positif menuju pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Sungai Rambutan.

Pada tahap pembuatan keputusan akhir atau penentuan prioritas usulan dalam Musrenbangdes, berfokus pada pemilihan program yang efisien untuk mengatasi hambatan dan peluang yang muncul. Namun, dalam dua tahun terakhir, prioritas alokasi dana desa diarahkan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, yang mempengaruhi prioritas pembangunan lainnya yang bersifat fisik dan non-fisik.

Konsep teori tawar-menawar dalam konteks tata kelola kolaboratif, seperti yang diusulkan oleh Clements (2010), mengacu pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak [18]. Teori tawar-menawar ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah solusi kolektif yang diusulkan dalam kolaborasi dapat berhasil atau malah menjadi penghambat, terutama dalam institusi atau sistem yang memiliki berbagai tingkat skala, baik itu dalam skala kecil maupun besar.

1. Kolaborasi dalam Skala Kecil

Dalam konteks skala kecil, seperti kolaborasi di tingkat desa atau komunitas lokal, teori tawar-menawar dapat membantu dalam menilai sejauh mana pemangku kepentingan lokal dapat berinteraksi secara efektif. Ini mencakup kemampuan mereka untuk bernegosiasi, berbagi sumber daya, dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Misalnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di desa, pemilik lahan, petani, dan pihak yang terlibat dalam pertanian dapat menggunakan teori tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

2. Kolaborasi dalam Skala Besar

Di level yang lebih besar, seperti tingkat regional, nasional, atau bahkan internasional, konsep teori tawar-menawar masih relevan. Namun, tantangan yang dihadapi bisa jauh lebih kompleks. Kolaborasi di tingkat nasional, misalnya, dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Dalam kasus ini, teori tawar-menawar membantu dalam mengevaluasi apakah semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan bernegosiasi.

3. Penghadapan Tantangan

Tantangan dalam tata kelola kolaboratif, baik dalam skala kecil maupun besar, dapat mencakup perbedaan kepentingan, konflik, dan ketidaksetaraan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat. Teori tawar-menawar dapat membantu mengidentifikasi solusi yang mungkin memerlukan kompromi, perubahan kebijakan, atau reformasi institusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

4. Penerapan Kebijakan

Hasil dari tawar-menawar ini juga memengaruhi penerapan kebijakan dan solusi kolektif yang dihasilkan. Dalam skala besar, kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi dapat memengaruhi banyak orang dan sektor. Oleh karena itu, evaluasi tawar-menawar perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kedua skala, penting untuk memahami bahwa teori tawar-menawar bukan hanya tentang negosiasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, keadilan, dan partisipasi yang setara. Dengan menerapkan konsep ini, tata kelola kolaboratif dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah publik, terlepas dari tingkat skala yang terlibat.

Dalam konteks Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan, pendekatan kolaboratif memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan dan menghasilkan pembangunan yang lebih holistik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan:

- **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Salah satu tantangan utama adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses Musrenbangdes dan pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Pendamping desa dapat berperan penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam merumuskan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- **Kolaborasi dengan Akademisi**

Mengundang akademisi dan para pakar dalam berbagai bidang dapat memberikan perspektif tambahan dan sumber daya pengetahuan yang berharga. Mereka dapat membantu dalam menganalisis masalah yang ada dan merumuskan solusi yang lebih baik. Misalnya, dalam merancang program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, akademisi dapat memberikan wawasan tentang metode dan praktik terbaik.

- **Pertimbangkan Pembangunan Nonfisik**

Selain pembangunan fisik, perlu memperhatikan pembangunan nonfisik yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini termasuk pelatihan keterampilan, program pendidikan, dan pengembangan lembaga seperti BUMDes dan BPD. Pendekatan ini membantu memperkuat aspek sosial dan manusia dalam pembangunan desa.

- **Peran Pihak Swasta**

Pihak swasta juga dapat menjadi mitra penting dalam mendukung pembangunan desa. Mereka dapat memberikan perspektif ekonomi, infrastruktur, dan pengalaman dalam pengelolaan proyek. Selain itu, mereka dapat menjadi mitra pembiayaan yang membantu mendukung proyek-proyek pembangunan desa yang memerlukan anggaran besar.

Pendekatan kolaboratif seperti ini menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berfokus pada pemecahan masalah yang holistik. Ini tidak hanya mengandalkan sumber daya keuangan dari pemerintah desa, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan, keahlian, dan kontribusi berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, desa dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mencapai perkembangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kolaborasi dalam Musrenbangdes dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Dalam *collaborative governance*, berbagai pihak atau pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengambil keputusan dan mengelola masalah-masalah kompleks. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif, keterbukaan, kolaborasi antar organisasi, orientasi pada hasil, penanganan masalah kompleks, dan kemungkinan inovasi. Ini memungkinkan berbagai sektor dan kelompok untuk bergabung dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan yang sulit. *Collaborative governance* dapat diterapkan dalam berbagai tingkatan, dari tingkat lokal hingga nasional atau internasional, dan merupakan alat yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang inklusif, kebijakan yang lebih baik, dan solusi yang lebih efektif dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai pihak dapat mengatasi masalah-masalah yang sulit dengan cara yang lebih efisien dan inovatif, menciptakan dampak positif dalam masyarakat

References

- [1] Luqito, Dimas. Collaborative Governance. <https://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- [2] Puspaningtyas, Anggraeni. Collaborative Governance : Sebuah Paradigma ?. <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>
- [3] Fajri, Muchamad. Collaborative governance dalam perencanaan ruang terbuka hijau di kota malang tahun 2017. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166892/1/Muchamad%20Fajri.pdf>
- [4] Kurniasih, Denok., dkk. Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (slbm) di kabupaten banyumas. *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 1 - 7
- [5] Jahro, Siti. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan. <https://repository.unej.ac.id/>
- [6] Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si., dkk. “Collaborative Governance dan Inovasi Kebijakan dalam Pembangunan Daerah”. https://repository.uin-suska.ac.id/53073/1/Prosiding%20SEMNAS%20IAPA%202019_%20Final.pdf
- [7] Irawan. 2017. (Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya) <https://repository.unair.ac.id/67642/>
- [8] Ratner. 2012. Collaborative Governance Assessment. Malaysia: CGIAR. Sabaruddin, Dr. Abdul. 2015. Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik;
- [9] Rafinzar, Rahmat, & Astuti, R. S. (2021). (Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau , Kabupaten Banyuasin , Sumatera Selatan). 7, 429–450.
- [10] Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- [11] Emercon, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. 2012. An Integrative Framework for Collaboration Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 22, pp-1-29.
- [12] Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- [13] Erik-Hans Klijin. 2010. THE IMPACT OF NETWORK MANAGEMENT ON OUTCOMES IN GOVERNANCE NETWORKS. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9299.2010.01826.x>
- [14] Susilowati, Retno., dkk. 2022. Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)* ISSN: 2721-1991
- [15] Gurvantry, Dory., dkk. 2022. ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *Journal of Public Administration Studies*.
- [16] Chusnul, Hidayat., dkk. 2021. ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *Jurnal Ketahanan Nasional*